

Peningkatan Keterbacaan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	288 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.369.284.963	96 Dokumen	2.422.080.000	48 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	379.259.145	12	121.840.000	12	46.920.000	12	74.130.000	115.230.000	36	358.120.000	132	2.780.200.000	46%	30%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Keterbacaan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	130.391.074	8 Dokumen	34.149.000	4 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.999.600	0	0	2	0	0	2.483.000	49.095.000	8	51.578.000	16	85.727.000	42%	66%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Keterbacaan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	48 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	130.391.074	16 Dokumen	33.065.950	18 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20.000.000	5	0	4	0	5	930.000	7.865.000	16	8.795.000	32	41.860.950	67%	32%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Keterbacaan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																				
Peningkatan Keterbacaan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	226 Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.091.428.194	51 Orang	477.058.500	52 Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	802.379.000	5	79.270.000,00	16	273.640.558	8	68.488.996	342.803.087	47	764.202.641,00	98	1.241.261.141	43%	114%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Keterbacaan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah																				
Peningkatan Keterbacaan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.262.626.871	5 Paket	273.036.800	9 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67.045.832	0	0	4	3.367.000	5	10.612.800	37.165.431	9	51.145.231	14	324.182.031	58%	26%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Keterbacaan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	126 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	332.010.675	42 Paket	99.215.300	22 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56.694.915	10	0	10	1.600.000	0	11.735.418	31.512.867	22	44.848.285	64	144.063.585	51%	43%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Keterbacaan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	284.699.989	6 Paket	56.399.300	5 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8.039.000	0	0	3	0	0	2.683.950	970.000	5	3.653.950	11	60.053.250	61%	21%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Keterbacaan Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	1.04.01.2.0 6.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	36 Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	114.068.171	2 Paket	2.029.200	2 Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2.029.200		2%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	1.04.02.2.0 1.01	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5 Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.549.999.500	1 Dokumen	163.399.500	1 Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	135.997.354	0	16.214.200	0	33.771.077	0	18.060.750	1	67.080.050	1	135.126.077	2	298.525.577	40%	19%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	1.04.02.2.0 1.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5 Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1.429.999.400	1 Dokumen	134.124.400	1 Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	135.999.810	0	0	0	58.175.724	1	4.242.000		72.984.000	1	135.401.724	2	269.526.124	40%	19%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	1.04.02.2.0 6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tertaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																					
Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	1.04.02.2.0 6.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	30 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	379.999.720	0	0	3 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	99.999.523	0	0	1	14.864.176	1	17.616.000	1	78.613.140	3	111.093.316	3	111.093.316	10%	29%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)							10		10				70		100						Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.0 1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							10		10				70		100						Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.0.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	80 Laporan	686.499.800	4 Laporan	287.194.800	36 Laporan	385.000.000	6	27.804.200.000	21	77.999.429	6	41.986.000	162.589.211	33	310.378.840,00	37	597.573.640	46%	87%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.0.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.0.2.08	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	5 Dokumen	1.949.999.500	2	9.990.000	1 Dokumen	433.000.000	0	10.650.000,00	0	6.966.600	0	62.080.198	1	361.787.700	1	441.484.498,00	3	451.474.498	60%	23%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.0.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Tersedianya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							5		5		20	70		100							
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.0.3.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan / Pemukiman Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemukiman Permukiman Kumuh	5 Dokumen	2.349.999.600	1 Dokumen	614.593.658	1 Dokumen	123.000.000	0	0	0	620.000		10.800.000		102.160.000	0	113.580.000	1	728.173.658	20%	31%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.03.2.0.3.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	846 Unit	17.351.263.570	92 Unit	1.701.050.000	88 Unit	2.001.516.400	0	0	0	0	0	52.366.275	88	1.940.548.500	88	1.992.914.775,00	180	3.693.964.775	21%	21%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani																				Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.04.2.0.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota																				Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.04.2.0.1.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	225 Unit	4.999.999.920	207 Unit	4.598.747.700	79 Unit	1.921.324.000	0	18.900.500	0	6.960.000	0	79.302.300	79	1.812.193.900	79	1.917.356.700	286	6.516.104.400	92%	130%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)																				Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Meningkatkan Terbit Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Presentase pengelolaan izin pembukaan lahan	40%	4.123.872.113	283.840.148	21%	292.734.663	0%	22.846.730,00	8%	23.029.865	15%	147.351.495	21%	74.577.690	21%	267.805.780	551.645.928	0%	13%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Meningkatkan Terbit Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah	40%	3.594.016.683	283.840.148	21%	292.734.663	0%	22.846.730,00	8%	23.029.865	15%	147.351.495	21%	74.577.690	21%	267.805.780	551.645.928	0%	15%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Meningkatkan Terbit Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	67 Dokumen	2.128.758.127	23 Dokumen	283.840.148	10 Dokumen	292.734.663	0	22.846.730	10	23.029.865	0	147.351.495	0	74.577.690	10	267.805.780	33	551.645.928	49%	26%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Meningkatkan Terbit Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.10.10	PROGRAM PENYATAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah	40%	2.062.985.143	89.066.600	25%	548.268.161	0%	4.500.000	7,00%	50.111.400	18%	124.429.916	25%	191.345.751	25%	370.387.067,00	459.453.667	0%	22%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Meningkatkan Terbit Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	40%	2.062.985.143	89.066.600	25%	548.268.161	0%	4.500.000	7,00%	50.111.400	18%	124.429.916	25%	191.345.751	25%	370.387.067,00	459.453.667	0%	22%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
Meningkatkan Terbit Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	73 Laporan	743.328.475	5 Laporan	89.066.600	32 Laporan	131.999.465	0	4.500.000	16	50.111.400	6	9.592.000	4	28.051.480	26	92.254.880,00	31	181.321.480	42%	24%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Meningkatkan Terbit Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kawasan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	25 Dokumen	578.328.594	8 Dokumen	56.167.650	30 Dokumen	298.269.218	0	0	0	0	6	85.354.695	10	136.665.153	16	222.019.848	24	278.187.498	32%	48%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Meningkatkan Terub Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum pengusahan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.10.10.2.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	43 Dokumen	741.328.074	13 Dokumen	131.387.002	17 Dokumen	117.999.478	0	0	0	0	2	29.483.221	10	26.629.118	12	56.112.339	25	187.499.341	58%	25%	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Predikat kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tindak lanjut yang diberikan dalam uraian																								
Tindak lanjut yang diberikan dalam RPNMA PD																								

- Faktor Pendorong**
1. Adanya komitmen yang kuat untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan dinas sesuai dengan jadwal dan target yang telah disepakati
 2. Tersedianya SDM yang berkompeten dan sarana prasarana kerja yang menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
 3. Terjalimnya koordinasi yang baik antar Bidang/Seksi di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta dengan pihak terkait lainnya
 4. Faktor pendukung berjalan baiknya kegiatan adalah optimalnya koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan Bidang Perumahan dengan instansi-instansi terkait.

- Faktor Penghambat**
1. Realisasi masih jauh dari target dikarenakan terlalu tingginya target yang diberikan. Mengingat dari segi pelaksanaan kegiatan dilapangan telah berjalan baik menyesuaikan dengan anggaran yang ada.
 2. Keterbatasan ketersediaan material dan faktor cuaca.
 3. Pelaksanaan Mediasi Sengketa hanya dapat dilakukan dengan Permohonan Para Pihak yang Bersengketa dalam wilayah Kutai Barat, sehingga realisasi pelaksanaan mediasi Sengketa tergantung dari jumlah permohonan yang disampaikan.
 4. Terdapat Permohonan Mediasi Sengketa Pada Kecamatan Yang Tidak Terdapat Alokasi Anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi.
 5. Untuk Lokasi Air Baku IPA dan booster PDAM belum memiliki study kelayakan yang menjadi dasar dalam penyusunan DPPT (Pengguna Tanah Tidak Dapat Menunjukkan Dokumen yang Dimaksud)
 6. Untuk Lokasi Taman Religi Bukit Lolong, Lokasi belum memiliki study kelayakan dan Belum Ada Lokasi yang Jelas (Luas dan Letak Tidak Jelas)
 7. Beberapa Kegiatan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan karena narasumber yang telah dijadwalkan dari Kantor Pertanahan (BPN) tidak dapat menghadiri kegiatan yang direncanakan.

- Tindak Lanjut**
1. Akan ditingkatkan lagi keaktifan dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, sehingga hasil yang diberikan ditahun-tahun berikutnya lebih maksimal.
 2. Memberikan toleransi waktu pemenuhan material kepada penyedia.
 3. Perlunya dilakukan Identifikasi Sengketa di Semua Kecamatan Wilayah Kab. Kutai Barat
 4. Pemenuhan Anggaran Mediasi untuk Semua Kecamatan atau dibuat secara gelondongan jika tidak Teranggarkan semua Kecamatan.
 5. Adanya Pemisahan Anggaran Antara Perencanaan dan Belanja Modal Tanah dimana Anggaran Tahapan Perencanaan, persiapan, pelaksanaan Pengadaan Tanah Pada Tahun Pertama. Sedangkan Belanja Modal Tanah Pada Tahun Selanjutnya.
 6. Pengalokasian Dana Untuk Pengadaan Tanah hanya bagi pengajuan Pengadaan Tanah dari Pengguna Tanah Kepada Disperkintan untuk lokasi/tanah dan jelas lokasi dan luasnya yang telah memiliki Studi Kelayakan.
 7. Akan menggunakan narasumber bukan hanya dari Kantor Pertanahan (BPN), tetapi dari Instansi lain atau dari Disperkintan sendiri.

Mengetahui
Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Kutai Barat

Sendawar, 16 Januari 2024
Kepala Perangkat Daerah

YUDIANTO RIHARTONO, ST., M.Si
NIP. 19760723 201001 1 008

KAMIUS JUNAIDI, SE., M.Si
NIP. 19730628 200112 1 004